

TREN Global Perlu **TEROBOSAN** **PAJAK**

Penulis: Novita Hifni
Foto: Dok. Rivan Fazry

Pemerintah perlu mengantisipasi perubahan global yang kini mengarah pada pemanfaatan sumber alam berkelanjutan dengan menerapkan regulasi perpajakan di ranah hilir.

Kebijakan pajak yang tepat dapat menjadi instrumen yang menentukan keberhasilan laju perekonomian dan penguatan daya beli masyarakat. Managing Partner Kantor Konsultan Pajak Persekutuan Soewito, Fajar dan Rekan (TaxPrime), Muhamad Fajar Putranto menyatakan, instrumen pajak dapat memperlambat atau mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui penerbitan regulasi atau aturan tertentu.

Ia memberi contoh upaya percepatan ekonomi di masa pandemi yang ditempuh dengan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Sedangkan kebijakan pajak yang tidak tepat justru dapat berakibat menurunnya daya beli masyarakat yang akhirnya memperlambat laju ekonomi.

"Memperingati Hari Pajak tahun 2021 yang masih berada dalam situasi pandemi ini perlu ada kebijakan yang memberi efek percepatan luar biasa pada ekonomi," kata Fajar kepada *Majalah Pajak* di kantor TaxPrime, Jakarta, Jumat (26 /06).

Menurutnya, sudah saatnya Direktorat

SAATNYA DJP
MENINJAU ULANG
REGULASI DAN SISTEM
PEMAJAKAN DI
INDONESIA SEIRING
PERKEMBANGAN
ZAMAN. TERLEBIH,
DENGAN BEGITU
BESARNYA POTENSI
SUMBER DAYA ALAM
YANG MELIMPAH DAN
MENJADI DAYA TARIK
INVESTASI ASING.



Jenderal Pajak (DJP) meninjau ulang regulasi dan sistem pemajakan di Indonesia seiring perkembangan zaman. Terlebih, dengan begitu besarnya potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan menjadi daya tarik investasi asing dalam situasi yang mengarah ke pemanfaatan sumber energi hijau, maka perlu ada terobosan kebijakan yang dapat mengantisipasi perubahan global.

"Indonesia punya sumber alam begitu banyak. Maka perlu ada integrasi kebijakan dari segi pajak yang bisa mempercepat pemulihan dan memastikan potensi ekonomi dari kekayaan alam itu tetap ada di sini," jelasnya.

Fajar membeberkan contoh keberhasilan Singapura sebagai negara yang tak punya kekayaan alam tetapi mampu menempatkan perusahaan dagang di sektor perdagangan komoditas hasil alam dari berbagai produsen di dunia. Perusahaan-perusahaan itu harus menggunakan jasa perbankan Singapura tetapi mereka diberi insentif pajak melalui General Trading Programme (GTP). Program itulah yang membuat Singapura memiliki cadangan sumber dana yang



INDONESIA PUNYA SUMBER ALAM
BEGITU BANYAK. MAKA PERLU ADA
INTEGRASI KEBIJAKAN PAJAK YANG
BISA MEMPERCEPAT PEMULIHAN
DAN MEMASTIKAN POTENSI
EKONOMI DARI KEKAYAAN ALAM
ITU TETAP ADA DI NEGERI SENDIRI.

MUHAMAD FAJAR PUTRANTO
Managing Partner TaxPrime



besar di institusi perbankan yang dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan sektor riil dan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.

Antisipasi

Ia mengingatkan situasi dunia di tahun 2022 yang terancam resesi akibat pandemi berkepanjangan. Sementara beberapa sumber alam yang dimiliki Indonesia seperti nikel dan panas bumi kini menjadi potensi ekonomi baru seiring kebutuhan dunia akan sumber energi berkelanjutan. Ia meyakini banyak investor yang berminat menanamkan modalnya di Indonesia karena memang membutuhkan bahan baku seperti nikel untuk mendukung industri hijau. Oleh karenanya, imbuh Fajar, pemerintah sebaiknya jangan hanya meregulasi di sektor hulu dengan pemberian *tax holiday* tapi harus lebih memfokuskan implementasi instrumen pajak dengan mengikuti aliran dana (*follow the money*) hingga ke hilir.

Pengaturan di ranah hilir ini adalah untuk melindungi potensi kekayaan alam agar tidak dengan mudahnya lari ke luar negeri dengan menerapkan GTP bagi *trading company* dalam perdagangan komoditas dari sumber alam di Indonesia. Ia mengatakan, penerapan GTP dengan memberikan kelonggaran pajak bagi *trading company* sebagai insentif agar menempatkan dananya di Indonesia tidaklah sulit. Pemerintah tinggal menerbitkan aturan baru bagi *trading company*, memberi tarif pajak yang lebih longgar dan kompetitif agar dana investasi ditempatkan di Indonesia. Langkah ini akan memberikan *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian.

"Mulai tahun 2022 terbitkan aturan agar semua perdagangan komoditas harus menggunakan fasilitas Bank Indonesia. Maka BI akan jadi bank sentral sekuat JP Morgan. Suku bunga turun, daya beli masyarakat meningkat. Investasi akan tetap banyak karena uangnya masuk ke

Indonesia. Tenaga kerja tentu juga banyak terserap," paparnya.

Ia juga mengusulkan pentingnya suatu forum yang menjadi wadah bagi seluruh pegawai pajak untuk memberikan gagasan kebijakan terbaik bagi sistem pemajakan di masa depan. Menurutnya, DJP memiliki modal sumber daya manusia (SDM) yang besar dan berkompeten. Pegawai pajak sebanyak 42 ribu orang adalah kekuatan luar biasa yang perlu diberdayakan agar tidak sekadar menjalankan tugas pekerjaan, tapi juga memberikan gagasan cemerlang berdasarkan keilmuan dan pengalaman di lapangan.

"Forum pegawai pajak ini sangat penting dimintai gagasannya untuk memikirkan tentang berbagai hal, mulai dari definisi *tax payer*. Lalu evaluasi sistem pemajakan yang sekarang dan antisipasi perkembangan di masa depan yang mulai mengarah ke ekonomi hijau," imbuh Fajar.